

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DI  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Javier Syarif Ananta Syahbana**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[javiersyarif3@gmail.com](mailto:javiersyarif3@gmail.com)

**Muhammad Yasin**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[yasin@untag-sby.ac.id](mailto:yasin@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This research was conducted to examine the influence of Central Government Transfer revenue and Local Own-Source Revenue (PAD) on local economic development in Mojokerto Regency. A quantitative approach was employed, combining descriptive and associative analyses with an inductive reasoning framework. The study utilized secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Data processing and analysis were carried out using multiple linear regression through SPSS software. The findings reveal that Central Government Transfer revenue and Local Own-Source Revenue jointly have a significant effect on local economic development, as indicated by the F-test results with a significance level below 0.05. When examined individually, Local Own-Source Revenue demonstrates a positive and statistically significant influence on local economic development. In contrast, Central Government Transfer revenue shows a positive relationship, although its effect is not statistically significant. Furthermore, the coefficient of determination ( $R^2$ ) value of 0.971 suggests that 97.1 percent of the variation in local economic development can be explained by the two independent variables included in the model. These results imply that Local Own-Source Revenue plays a more substantial role in promoting local economic development compared to Central Government Transfer revenue. Therefore, strengthening and optimizing local revenue sources can be considered a key policy strategy to support sustainable economic development in Mojokerto Regency.

**Keywords:** *Central Government Transfer Revenue, Local Revenue, Local Economic Development, Multiple Linear Regression, Mojokerto Regency.*

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk di Indonesia. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya ekonomi secara efektif serta berkelanjutan. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara optimal. Penerapan kebijakan

otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan (Pertiwi et al., 2026).

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Keuangan daerah mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik (Anandita et al., 2024). Kinerja keuangan daerah yang baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi lokal serta menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Kapasitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta komponen pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pembangunan ekonomi lokal menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah. Pada dasarnya, proses pembangunan memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperluas akses terhadap berbagai pilihan dalam bidang ekonomi maupun sosial bagi setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2012). Dalam konteks lokal, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga lebih menekankan pada bagaimana masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya, seperti meningkatnya kesempatan kerja, daya beli, serta berkembangnya kegiatan usaha di lingkungan sekitar. Pembangunan ekonomi lokal diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu tingkat kesempatan kerja, tingkat pengeluaran per kapita sebulan, dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Permasalahan pengelolaan keuangan daerah sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul yakni keterbatasan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta besarnya ketergantungan daerah pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah serta membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan (Febrianti et al., 2025). Selain itu, perencanaan anggaran yang kurang tepat serta alokasi belanja yang belum optimal sering kali menyebabkan penggunaan anggaran daerah menjadi kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas manajerial dan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah secara optimal.

**Tabel 1.1 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2009-2024 (Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita
2009	355.051
2010	387.394
2011	486.258
2012	555.724
2013	584.070
2014	776.123
2015	908.082
2016	913.528
2017	1.076.886
2018	1.034.807
2019	1.151.054
2020	1.206.235
2021	1.044.859
2022	1.267.276
2023	1.355.068
2024	1.345.014

Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai berbagai potensi ekonomi yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut berperan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah serta mendorong perkembangan ekonomi lokal. Upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting. Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong peningkatan pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan transfer pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, menggunakan pembangunan ekonomi lokal sebagai variabel terikat yang diukur dengan pengeluaran per kapita sebulan, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita sebagai indikator. Kedua, penelitian ini menggunakan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas, sementara penelitian sebelumnya umumnya menggunakan komponen dana transfer secara terpisah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah terhadap

pembangunan ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik daerah yang diteliti.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Mamesah yang dikutip oleh Halim & Kusufi (2014), keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk berbagai aset berupa uang dan barang yang menjadi kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Abdul Halim (2007:19) dalam Vurry et al. (2018), keuangan daerah mencakup seluruh aset, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinyatakan di nilai moneter. Selain itu, segala bentuk kekayaan daerah, baik berupa dana maupun barang, termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah selama kepemilikannya berada pada pemerintah daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

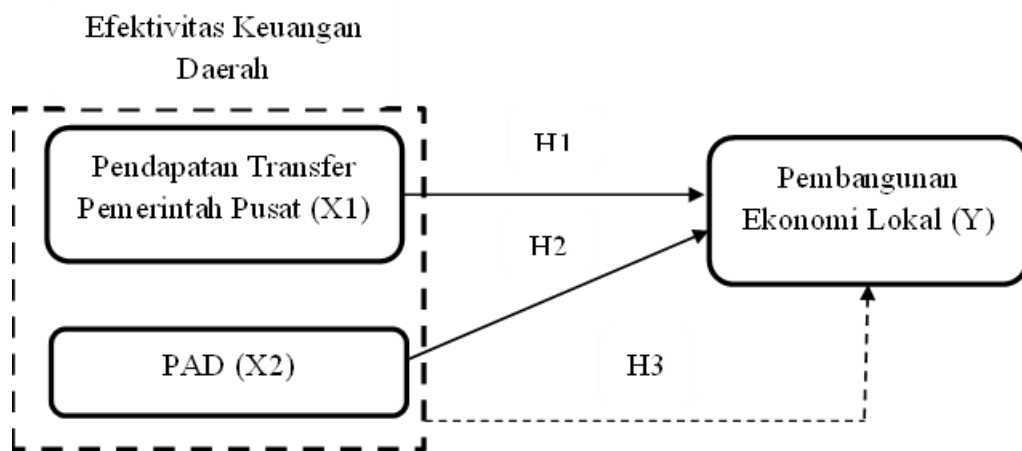
Pembangunan ekonomi lokal merupakan proses pengembangan perekonomian daerah yang bertujuan meningkatkan daya saing wilayah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bersama berbagai organisasi masyarakat berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong terbukanya kesempatan kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Dayat NS Wiranta, 2015). Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya untuk memperkuat daya saing perekonomian di tingkat daerah sebagai dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan belanja daerah yang tercantum dalam APBD. Keberadaan dana transfer sangat membantu daerah, khususnya yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas, dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, transfer pemerintah pusat memiliki kontribusi yang besar terhadap kapasitas keuangan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, dana transfer disalurkan melalui skema Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak maupun pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Efektivitas alokasi dan penggunaan dana transfer akan sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mamuka & Elim, 2014).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dimiliki pemerintah untuk membiayai fasilitas pembangunan di daerah tersebut. Menurut Anggoro (2017), PAD dapat dijelaskan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, menyediakan pelayanan pada publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia pada wilayahnya. PAD kerap digunakan pengukuran kemandirian dan perkembangan pada suatu daerah. Karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, tingkat ketergantungan pemerintah

daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat semakin rendah.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Menurut ahli Mardiasmo (2018), Efektivitas merupakan ukuran untuk menilai apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, maka organisasi tersebut dapat dianggap efektif. Penilaian efektivitas tidak didasarkan pada besarnya pengeluaran yang digunakan. Biaya yang digunakan bisa saja melebihi anggaran yang telah direncanakan, bahkan hingga dua kali lipat. Namun, selama tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan efektif.



Gambar 1.1 Gambar Kerangka Konseptual

- H1: Pendapatan transfer pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
- H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
- H3: Pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pembangunan ekonomi lokal.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif serta menggunakan penalaran induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Mojokerto. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan masing-masing variabel penelitian, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel tersebut berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Sebelum dilakukan pengolahan statistik, seluruh data penelitian terlebih dahulu dikonversi ke bentuk logaritma (log) untuk menyamakan rentang nilai antarvariabel serta meningkatkan kualitas hasil estimasi model, dan membantu memenuhi asumsi dalam analisis regresi. Selanjutnya, metode regresi

linier berganda diterapkan untuk mengetahui sejauh mana pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah memengaruhi pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Mojokerto. Data tersebut diuji menggunakan aplikasi software SPSS versi 26.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Uji Deskriptif**

**Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG_PEL_Y	16	5,55	6,13	5,9194	0,19213
LOG_PTPP_X1	16	11,81	12,26	12,075	0,15227
LOG_PAD_X2	16	10,78	11,86	11,5131	0,35737
Valid N (listwise)	16				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 1, Analisis Deskriptif menunjukkan bahwa:

1. Variabel pembangunan ekonomi lokal (Y) yang berperan sebagai variabel terikat memiliki jumlah observasi sebanyak 16 data. Hasil nilai rata-rata sebesar 5,9194, dengan nilai tertinggi mencapai 6,13 dan nilai terendah sebesar 5,55. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0,19213 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif rendah, sehingga kondisi pembangunan ekonomi lokal selama periode penelitian cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang besar.
2. Variabel pendapatan transfer pemerintah pusat (X1) memiliki jumlah observasi sebanyak 16 data. Hasil nilai rata-rata sebesar 12,0750, dengan nilai tertinggi 12,26 dan nilai terendah 11,81. Sementara itu, standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,15227 mengindikasikan bahwa data Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat cenderung memiliki tingkat penyebaran yang rendah sehingga nilainya relatif homogen selama periode penelitian.
3. Variabel pendapatan asli daerah (X2) juga terdiri atas 16 data pengamatan. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 11,5131, dengan nilai maksimum 11,86 dan nilai minimum 10,78. Adapun standar deviasi sebesar 0,35737 menunjukkan bahwa data PAD memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, sehingga variasi nilainya selama periode penelitian relatif lebih besar.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 2 Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
1 (Constant)	-3,564	1,615		-2,206	0,046		
LOG_PTPP_X1	0,464	0,216	0,368	2,15	0,051	0,076	13,163
LOG_PAD_X2	0,337	0,092	0,627	3,662	0,003	0,076	13,163

a. Dependent Variable: LOG\_PEL\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Log } Y = -3,564 + 0,464 \cdot \text{log } X_1 + 0,337 \cdot \text{log } X_2 + \text{log } e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel (Y) memiliki nilai sebesar -3,564  
 Nilai konstanta sebesar -3,564 menunjukkan bahwa apabila pendapatan transfer pemerintah pusat (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) bernilai nol, maka nilai variabel (Y) diperkirakan sebesar -3,564.
2. Variabel (X1) memiliki nilai sebesar 0,464  
 Nilai koefisien regresi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 0,464 menunjukkan adanya hubungan positif dengan pembangunan ekonomi lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat cenderung diikuti oleh peningkatan pembangunan ekonomi lokal. Dengan asumsi pendapatan asli daerah tetap, setiap kenaikan satuan pendapatan transfer pemerintah pusat akan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal sebesar 0,464.
3. Pendapatan asli daerah (X2) memiliki nilai sebesar 0,337  
 Nilai koefisien regresi sebesar 0,337 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah, pembangunan ekonomi lokal juga cenderung meningkat. Dengan asumsi variabel pendapatan transfer pemerintah pusat tetap, setiap kenaikan satu satuan pendapatan asli daerah diperkirakan akan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal sebesar 0,337 satuan.

**Uji F (Simultan)**

**Tabel 3 Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,538	2	0,269	218,283	,000 <sup>b</sup>
	Residual	0,016	13	0,001		
	Total	0,554	15			

a. Dependent Variable: LOG\_PEL\_Y

b. Predictors: (Constant), LOG\_PAD\_X2, LOG\_PTPP\_X1

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 218,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<sup>b</sup>, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, H3 diterima, sedangkan H0 ditolak.

**Uji T (Parsial)**

**Tabel 4 Hasil Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-3,564	1,615		-2,206	0,046		
LOG_PTPP_X1	0,464	0,216	0,368	2,15	0,051	0,076	13,163
LOG_PAD_X2	0,337	0,092	0,627	3,662	0,003	0,076	13,163

a. Dependent Variable: LOG\_PEL\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan pada Tabel 4.11, hasil Uji T dapat disimpulkan:

1. Nilai uji hipotesis variabel pendapatan transfer pemerintah pusat (X1) menunjukkan t hitung sebesar 2,150 Dengan nilai signifikansi sebesar 0,051 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 dinyatakan diterima dan H1 ditolak. Maka, variabel pendapatan transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sejalan dengan penelitian Laodini et al. (2023) yang menjelaskan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Nilai uji hipotesis variabel pendapatan asli daerah (X2) menunjukkan t hitung sebesar 3,662 Dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sisilia & Harsono (2021) yang menerangkan bahwa pendapatan

asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian Wardhana et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.

**Tabel 5 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,985 <sup>a</sup>	0,971	0,967	0,03509	2,232

a. Predictors: (Constant), LOG\_PAD\_X2, LOG\_PTPP\_X1

b. Dependent Variable: LOG\_PEL\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, hasil nilai *R Square* adalah 0,971 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal sebesar 97,1%. Sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Artinya pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh sebesar 97,1% pembangunan ekonomi lokal.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Mojokerto.
2. Secara parsial, pendapatan transfer pemerintah pusat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal, sehingga peningkatannya belum memberikan dampak yang nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal, yang menggambarkan bahwa bertambahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal secara lebih optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anandita Vivian Salsa Billa, Mely Widiyastuti, Olivia Yonata, & Yesi Lita Sari. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(3), 173–182. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.265>
- Anggoro Dwi Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Dayat NS Wiranta. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Lingkar Widyaiswara*, 2(3), 33–50. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com)
- Febrianti, G., Silaban, K., Sitanggang, N. H. U., & Lubis, P. K. D. (2025). Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –2023: Tinjauan Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2274–2280. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3684>
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). *Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik*.
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA PERIODE 2010 – 2021*. 23(6).
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 646–655.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. ANDI Offset.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). *Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia : Systematic Literature Review*. 4(4), 10365–10371.
- Sisilia, M., & Harsono. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development (11th ed.)*. In *Pearson*. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sofyan, M. N. F. (2021). Dampak Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten Jawa Barat. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 131–141. <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i2.3474>